

**ANALISIS BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2015-2019**

Endah Purwaningsih¹, Nuwun Priyono²

¹ Universitas Tidar, Magelang, Indonesia, purwaningsihendah15@gmail.com

² Univeristas Tidar, Magelang, Indonesia, nuwunpriyono@untidar.ac.id

ABSTRACT

Local Expenditure is all local government obligations recognized as a reduction in the value of net worth within the period of the relevant fiscal year. The government's success in managing regional spending can be seen from the output/results achieved by using the budget. Whether the achievement of the results provides benefits to the community or not. Good results show that local governments are performing well. The purpose of this research is to find out the financial performance of Magelang city government by conducting analysis of regional spending in fiscal year 2015-2019. The method used in this study is quantitative data measurement which results are interpreted with descriptive analysis methods. The results of this study show the Magelang City Government has been performing quite well. This is seen from the variance analysis showing budget planning and efforts to achieve budget usage efficiency are good enough, spending growth is volatile and positive, and the cost efficiency ratio is quite effective with an average efficiency rate of 85.47%. Even so, the Government still needs to improve the balance between capital expenditure and operating expenditure.

Keywords: *performance; local expenditure; Magelang City Government.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggunaan APBD saat ini dikaitkan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja. Dimana saat ini, pemerintah daerah dituntut agar mampu menggunakan APBD untuk menghasilkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari capaian

hasil dan manfaat yang diperoleh, kemudian dapat diketahui bagaimana kinerja yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Dalam acara “Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020” Menteri Keuangan, Sri Mulyani (14/11/2019) menyampaikan mengenai belum optimalnya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan masyarakat kurang optimal dalam menerima manfaat APBD, hal ini disebabkan karena rata-rata hampir 70% anggaran masih digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah dan masyarakat hanya menikmati sekitar 30% saja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penting untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dapat dilakukan dengan analisis belanja daerah. Belanja daerah merupakan salah satu pos penting dalam APBD yang penggunaannya menarik perhatian banyak pihak. Hal ini tidak terlepas dari nilainya yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Selain itu, belanja juga erat kaitannya dengan bagaimana suatu pemerintah daerah membiayai kegiatan dan program yang disusun setiap tahun anggaran. Tentu hasil yang diperoleh dari penggunaan belanja ini perlu diperhatikan, apakah membawa manfaat bagi masyarakat atau sebaliknya. Dari situlah kemudian kita dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tersebut. Dalam penelitian ini analisis belanja daerah yang dilakukan peneliti untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang, terdiri dari : (1) analisis varians belanja, (2) analisis pertumbuhan belanja, (3) analisis keserasian belanja, dan (4) analisis efisiensi belanja. Data yang digunakan untuk menghitung analisis belanja daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang dengan melakukan analisis belanja daerah tahun anggaran 2015-2019. Manfaat yang diperoleh penulis dan pembaca dari penelitian ini adalah dapat menganalisis data keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Magelang, dapat menghitung analisis belanja daerah, serta mengetahui kinerja Pemerintah Kota Magelang dilihat dari belanja yang dilakukan pada tahun anggaran berkenaan. Bagi Pemerintah Kota Magelang, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk evaluasi penyusunan anggaran dan pencapaian realisasi belanja agar dapat meningkatkan kinerja yang lebih optimal di tahun anggaran berikutnya.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam suatu organisasi. Secara umum, organisasi dapat dikategorikan dalam tiga sektor yaitu sektor bisnis, sektor publik dan sektor sosial. Organisasi sektor publik umumnya berorientasi pada pelayanan publik yang

dalam melakukan kegiatannya menerapkan pengelolaan keuangan basis akuntansi sektor publik. Bastian, I (2019) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik berperan untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* (pemangku kepentingan) untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi tersebut.

Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik, masyarakat dapat merasakan manfaat APBD secara optimal dan pemerintah juga akan memiliki citra kinerja yang baik. Begitupun sebaliknya, pengelolaan keuangan daerah yang kurang baik akan menyebabkan masyarakat kurang optimal dalam menerima manfaat APBD dan kinerja pemerintah juga menjadi kurang baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah biasanya menyusun APBD pada setiap satu tahun anggaran, yaitu meliputi masa satu tahun dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Laporan Realisasi Anggaran

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan yang sebelumnya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam lingkup pemerintahan daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus disusun adalah :

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Perubahan Ekuitas;
- f) Laporan Arus Kas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Belanja Daerah

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk mendanai berbagai program dan kegiatan yang telah disusun selama periode tahun anggaran berkenaan. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat (4) yaitu :

- a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (tahun anggaran).
- c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kinerja

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja pemerintah sangat

penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya (F. X. W. Katit., S. Pinatik., 2016). Salah satu hal yang menjadi fokus pengukuran kinerja adalah belanja daerah. Hal ini dikarenakan sifat belanja yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola belanja dengan baik sehingga dana (uang) yang dibelanjakan dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Anastasia Friska Palilingan, Harijanto Sabijono, dan Lidia Mawikere (2015) menyatakan hasil analisis kinerja belanja Pemerintah Kota Manado Tahun 2009-2013 menunjukkan varian belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan, pertumbuhan belanja yang positif dan cenderung fluktuatif, alokasi belanja yang lebih besar dialokasikan ke belanja modal dibandingkan belanja operasi, dan analisis pembiayaan secara umum sudah baik yang dapat terlihat dari SILPA bersaldo positif.

Penelitian Fransiskus X.W Katit dan Sherly Pinatik (2016) menyatakan dari 4 analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja belanja Kabupaten Asmat menunjukkan bahwa kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Asmat menunjukkan hasil yang positif dan baik dimana selama tahun 2013-2015 varian belanja menunjukkan pemerintah telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan, pertumbuhan belanja secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif, masih perlu adanya peningkatan dalam hal keserasian belanja, dan efisiensi belanja yang dilakukan mulai tahun 2013 sampai tahun 2015.

Penelitian Nur Hasanah dan Elok Dwi Vidiyastutik (2018) menyatakan bahwa secara umum hasil analisis kinerja realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2013-2017 menunjukkan peningkatan kinerja dalam pemenuhan belanja daerah, hal itu dapat terlihat dari hasil analisis belanja daerah yang menunjukkan persentase selisih anggaran dan realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya, pertumbuhan belanja yang tidak terlalu tinggi, meningkatkan pembangunan daerah dan melakukan penghematan yang tidak mengurangi proporsi pembelanjaan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi terdiri atas jutaan elemen yang tidak mungkin dapat diobservasi secara keseluruhan, oleh karena itu peneliti menggunakan sampel. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili (*representative*) anggota populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota

Magelang. LKPD terdiri atas beberapa elemen laporan keuangan meliputi : Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang setiap tahunnya laporan-laporan tersebut harus disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan APBD. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-2019. Penggunaan LRA sebagai sampel adalah karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kinerja belanja daerah yang dalam proses analisisnya perlu menggunakan data anggaran dan realisasi belanja. Data tersebut biasanya tersaji dalam LRA Pemerintah Daerah.

Jenis data pada penelitian ini merupakan jenis data runtun waktu (*time series*). Data runtun waktu merupakan jenis data yang nilainya diambil secara berurutan atau reguler selama periode waktu yang ditentukan. Runtun waktu pada penelitian ditentukan berdasarkan periode tahun, yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sumber data dalam penelitian merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang.

Metode Analisis Data

Data kuantitatif adalah jenis data berupa angka-angka yang berasal dari perhitungan masing-masing atribut pengukuran variabel. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Angka-angka yang tercantum dalam LRA menjadi elemen yang nantinya akan dimasukkan kedalam rumus analisis belanja daerah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk desain riset kuantitatif deskriptif. Teknik analisis ini dilakukan tanpa ada teknik pengujian hipotesis. Peneliti hanya melakukan analisis yang bersifat menjelaskan (*to explain*) fenomena yang ada. Teknik analisis ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan yaitu analisis tren untuk periode tahun anggaran 2015-2019 dan sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang dengan melakukan analisis belanja daerah tahun anggaran 2015-2019.

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis yaitu : 1) selisih disukai (*favourable variance*) dan 2) selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*. Untuk mengetahui

selisih (varians) belanja Pemerintah Kota Magelang, harus menggunakan pengukuran dengan analisis varians belanja. Analisis ini dilakukan dengan cara pengurangan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja pada tahun berkenaan.

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun maka harus dilakukan analisis pertumbuhan belanja. Pertumbuhan belanja penting untuk dianalisis karena kecenderungan belanja yang selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap tingkat inflasi, perubahan kurs/nilai tukar, perubahan jumlah cakupan layanan publik, dan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi makro. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan daerah agar seimbang dan harus rasional serta dapat dipertanggungjawabkan yang biasanya perlu dijelaskan lebih lanjut pada catatan atas laporan keuangan (CaLK). Untuk mengetahui pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Magelang harus menggunakan pengukuran analisis pertumbuhan belanja. Analisis ini dilakukan dengan cara pengurangan realisasi belanja tahun t (saat ini/tahun yang ingin dicari pertumbuhan belanjanya) dengan realisasi belanja satu tahun sebelumnya (t-1), kemudian hasilnya dibandingkan dengan realisasi tahun ini.

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } (t-1)}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}$$

Belanja daerah yang terdiri dari berbagai jenis membuat pemerintah daerah harus tepat dalam mengalokasikan dana APBD. Hal ini penting dilakukan agar proporsi untuk setiap belanja tepat sesuai dengan kebutuhannya. Analisis keserasian belanja menjadi pengukuran yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana keseimbangan dari proporsi yang diberikan pemerintah daerah untuk setiap jenis belanja. Dalam laporan realisasi anggaran terdapat 3 (tiga) kelompok belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi adalah belanja rutin yang memiliki masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun atau jangka pendek. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi dari total belanja daerah, yaitu sekitar 60-90 persen. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi memiliki kecenderungan porsi belanja operasi yang tinggi. Untuk mengetahui proporsi belanja operasi Pemerintah Kota Magelang harus menggunakan pengukuran rasio belanja operasi terhadap total belanja. Analisis ini dilakukan dengan cara perbandingan antara realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah.

$$\text{Rasio Belanja Operasi thd Total Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Berbeda dengan belanja operasi yang memiliki sifat rutin dengan masa manfaat jangka pendek, belanja modal merupakan belanja yang dilakukan pada saat ini dan diharapkan memberikan manfaat pada jangka menengah-panjang. Belanja modal juga tidak bersifat rutin dan memberikan pengaruh pada keuangan pemerintah yang masuk pada bagian penambahan aset tetap. Pada umumnya proporsi belanja modal yaitu sekitar 5-20 persen. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah memiliki kecenderungan porsi belanja modal yang tinggi. Untuk mengetahui proporsi belanja modal Pemerintah Kota Magelang harus menggunakan pengukuran rasio belanja modal terhadap total belanja. Analisis ini dilakukan dengan cara perbandingan antara realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang digunakan pemerintah dapat dilakukan dengan penghitungan rasio efisiensi belanja. Hasil yang diperoleh dari penghitungan rasio ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Melainkan kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja daerah yang dilakukan pemerintah relatif lebih efisien dibandingkan dengan tahun lalu atau sebaliknya. Untuk mengetahui efisiensi belanja Pemerintah Kota Magelang harus menggunakan pengukuran rasio efisiensi. Penghitungan rasio ini dilakukan dengan cara perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penghitungan dengan rumus analisis belanja daerah di bawah ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-2019. Sebelum menggunakan data dalam LRA pastikan bahwa laporan tersebut sudah di audit untuk memastikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah sudah dilakukan, sehingga penggunaan data menjadi lebih andal dan terpercaya. Angka-angka yang tersaji dalam LRA kemudian dimasukkan sesuai dengan rumus penghitungan yang sudah dijelaskan pada bagian analisis data.

Analisis Varians Belanja

Analisis belanja daerah dengan menggunakan rumus varians belanja daerah menunjukkan selisih (varians) antara realisasi belanja dan anggaran belanja Pemerintah Kota Magelang selama tahun 2015-2019 bersaldo negatif. Artinya, realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran belanja yang sudah ditetapkan. Dalam hal realisasi belanja yang

lebih kecil dari anggarannya disebut *favourable variance* (selisih yang disukai). Besar selisih realisasi dengan anggaran belanja memberikan dua kemungkinan. Pertama, hal itu bisa menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan kedua, jika selisihnya cukup besar maka mengindikasikan telah terjadi kelemahan perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya menjadi kurang tepat atau bisa terjadi karena adanya program atau kegiatan yang tidak dijalankan.

Tabel 1 Analisis Varians Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih	% Selisih	% Penyerapan Belanja
(a)	(b)	(c)	(d= c-b)	(e= d/b)	(f = c/b)
2015	925.102.159.000	736.340.437.750	(188.761.721.250)	20,40	79,59
2016	1.017.467.369.000	871.859.130.603	(145.608.238.397)	14,31	85,69
2017	1.075.623.121.000	879.408.181.447	(196.214.939.553)	18,24	81,76
2018	1.066.383.927.000	937.339.746.423	(129.044.180.577)	12,10	87,90
2019	1.093.001.723.000	994.945.773.787	(98.055.949.213)	8,97	91,03

Berdasarkan Tabel 1 hasil penghitungan dengan rumus analisis varians belanja menunjukkan selisih antara anggaran dan realisasi selama tahun anggaran 2015-2019. Besarnya selisih (variens) selama tahun 2015-2019 secara berurutan yaitu sebesar Rp. 188.761.721.250 atau 20,40% pada tahun 2015; tahun 2016 sebesar Rp. 145.608.238.397 atau 14,31%; tahun 2017 sebesar Rp. 196.214.939.553 atau 18,24%; tahun 2018 sebesar Rp. 129.044.180.577 atau 12,10%; dan tahun 2019 sebesar Rp. 98.055.949.213 atau 8,97%. Selisih (variens) belanja daerah Pemerintah Kota Magelang selama tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif. Selisih tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan selisih terendah pada tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa besarnya penyerapan anggaran belanja selama tahun 2015-2019 berturut-turut adalah 79,59%; 85,69%; 81,76%; 87,90%; dan 91,03%. Persentase penyerapan anggaran belanja tersebut menunjukkan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Sebagai contoh, penyerapan anggaran belanja tertinggi yang terjadi pada tahun 2019. Anggaran belanja terserap 91,03%, penghematan anggaran belanja yang dilakukan pada tahun 2019 sebesar Rp. 98.055.949.213 atau 8,97% dari total belanja. Besarnya penyerapan anggaran diatas 90% menunjukkan kinerja keuangan yang baik, dimana dalam hal ini berarti belanja daerah sebesar 91,03% sudah terserap melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan. Kemudian untuk pengematan anggaran belanja sebesar Rp. 98.055.949.213 dapat digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berikutnya.

Besarnya penyerapan anggaran dibawah 90% mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran, misalnya disebabkan adanya program atau kegiatan yang

tidak dijalankan. Sehingga, untuk penyerapan anggaran belanja tahun 2015-2018 yang berada di bawah 90% bisa dikatakan mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran belanja pada tahun berkenaan yang perlu dievaluasi oleh Pemerintah Daerah. Namun, terdapat hal yang perlu diapresiasi yakni peningkatan penyerapan anggaran belanja yang terjadi selama tahun 2015-2019 meskipun sempat turun pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Magelang terus berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pada tahun anggaran terkait. Peningkatan penyerapan anggaran belanja tentu harus dijaga kondisinya agar belanja daerah yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dapat secara optimal memberikan manfaat bagi masyarakat.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan Tabel 2 Hasil penghitungan dengan rumus pertumbuhan belanja menunjukkan selama tahun anggaran 2015-2019 belanja daerah Pemerintah Kota Magelang mengalami persentase kenaikan (pertumbuhan belanja). Pertumbuhan belanja selama tahun anggaran 2015-2019 secara berturut-turut yaitu 7,93% pada tahun 2015; 18,40% pada tahun 2016; 0,87% pada tahun 2017; 6,59% pada tahun 2018; 6,15% pada tahun 2019. Secara umum pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Kota Magelang selama tahun anggaran 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan pertumbuhan belanja terendah pada tahun 2017.

Tabel 2 Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Realisasi Belanja Th t-1	Realisasi Belanja Th t	Kenaikan / (Penurunan)	%
(a)	(b)	(c)	(d = b-c)	(e = d/c)
2014 - 2015	682.223.870.407	736.340.437.750	54.116.567.343	7,93
2015 - 2016	736.340.437.750	871.859.130.603	135.518.692.853	18,40
2016 - 2017	871.859.130.603	879.408.181.447	7.549.050.844	0,87
2017 - 2018	879.408.181.447	937.339.746.423	57.931.564.976	6,59
2018 - 2019	937.339.746.423	994.945.773.787	57.606.027.364	6,15

Pertumbuhan belanja daerah pada satu tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantaranya : besarnya inflasi pada tahun terkait, adanya tambahan cakupan pelayanan publik, pertumbuhan penduduk, belanja apa yang memerlukan dana paling besar/signifikan, faktor internal yang relatif terencana dan terkendali atau faktor eksternal di luar kendali pemerintah daerah. Sehingga dalam melakukan analisis pertumbuhan belanja perlu dilihat betul mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan belanja daerah. Saat ini anggaran pada organisasi

sektor publik seperti pemerintah daerah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Dimana dengan digunakannya sistem anggaran berbasis kinerja ini berarti bahwa setiap anggaran harus dikaitkan dengan target kinerja, maka tidak ada lagi kecenderungan hanya meningkatkan besarnya anggaran saja. Prinsipnya dalam hal menjaga pertumbuhan belanja, pemerintah daerah harus melakukan perencanaan anggaran yang baik dan pengendalian anggaran secara tepat sesuai target kinerja agar belanja terus tumbuh positif dan stabilitas fiskal daerah terjaga.

Analisis Keserasian Belanja

Agar fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi belanja. Melalui analisis keserasian belanja dapat terlihat bagaimana proporsi belanja yang diberikan untuk setiap jenis belanja. Selama tahun anggaran 2015-2019 belanja daerah Pemerintah Kota Magelang memiliki kecenderungan proporsi belanja operasi lebih besar daripada belanja modal. Proporsi terbesar untuk belanja operasi terjadi pada tahun 2015 dan proporsi terbesar untuk belanja modal terjadi pada tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa anggaran belanja lebih banyak dialokasikan pada belanja operasi. Belanja operasi Pemerintah Kota Magelang selama tahun anggaran 2015-2019 berturut-turut adalah 80,66%; 74,46%; 73,48%; 74,67%; dan 72,66%. Besarnya persentase belanja operasi terhadap total belanja daerah tersebut menunjukkan proporsi belanja operasi yang dominan. Kecenderungan proporsi belanja daerah yang dominan pada belanja operasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa APBD dilaokasikan untuk penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana yang memiliki masa manfaat dalam satu tahun anggaran. Secara keseluruhan, proporsi belanja operasi Pemerintah Kota Magelang dapat dikatakan baik karena pada umumnya belanja operasi mendominasi belanja daerah dengan persentase antara 60-90%.

Tabel 3 Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	%
(a)	(b)	(c)	(d = b/c)
2015	593.964.588.745	736.340.437.750	80,66
2016	649.227.700.687	871.859.130.603	74,46
2017	646.206.480.275	879.408.181.447	73,48
2018	699.921.003.430	937.339.746.423	74,67
2019	722.959.832.083	994.945.773.787	72,66

Tabel 4 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	%
(a)	(b)	(c)	(d = b/c)
2015	141.308.934.005	736.340.437.750	19,19
2016	221.924.457.916	871.859.130.603	25,45
2017	233.070.956.632	879.408.181.447	26,50
2018	237.418.742.993	937.339.746.423	25,33
2019	271.984.161.704	994.945.773.787	27,34

Hasil penghitungan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Tabel 4 menunjukkan proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja modal. Selama tahun anggaran 2015-2019 persentase belanja modal secara berturut-turut adalah 19,19%; 25,45%; 26,50%; 25,33%; dan 27,34%. Secara keseluruhan, proporsi belanja modal Pemerintah Kota Magelang dapat dikatakan baik karena pada umumnya persentase belanja modal terhadap total belanja daerah memiliki persentase antara 5-20%. Pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi cenderung sedikit dalam hal pengalokasian dana APBD untuk belanja modal. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tersebut sudah memiliki aset modal yang cukup. Penjelasan tersebut sejalan dengan penjelasan mengenai proporsi belanja operasi yang sudah dijelaskan pada paragraf pertama terkait dengan Pemerintah Kota Magelang merupakan pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi yang dalam pengalokasian belanja daerah dominan pada belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Rasio Efisiensi Belanja

Pengelolaan keuangan daerah menerapkan prinsip *value of money*. Tiga poin utama dalam prinsip *value of money* adalah ekonomi, efisien, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan penggunaan sumber daya tertentu dimana alternatif yang dipilih adalah sumber daya dengan harga paling rendah. Efisien adalah penggunaan dana daerah yang mampu memberikan hasil secara optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan efektivitas yang berarti penggunaan dana daerah harus sesuai dengan capaian kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efisien penting untuk dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Selain menjadi bagian dari penerapan prinsip *value of money* di dalam penggunaan dana daerah, efisien juga memberikan manfaat yaitu hasil yang optimal yang tentu akan membawa suatu daerah agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih maju. Sehingga berkaitan dengan hal ini, tingkat efisiensi penggunaan dana (anggaran) menjadi penting untuk diukur.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran belanja dikatakan tidak efisien jika rasio efisiensinya lebih dari 100%.
- b. Anggaran belanja dikatakan kurang efisien jika rasio efisiensinya antara 90% - 100%.
- c. Anggaran belanja dikatakan cukup efisien jika rasio efisiensinya antara 80% - 90%.
- d. Anggaran belanja dikatakan efisien jika rasio efisiensinya antara 60% - 80%.
- e. Anggaran belanja dikatakan sangat efisien jika rasio efisiensinya dibawah 60%.

Tabel 5 Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
(a)	(b)	(c)	(d = c/b)
2015	925.102.159.000	736.340.437.750	79,60
2016	1.017.467.369.000	871.859.130.603	85,69
2017	1.057.623.121.000	879.408.181.447	83,15
2018	1.066.383.927.000	937.339.746.423	87,90
2019	1.093.001.723.000	994.945.773.787	91,03

Hasil penghitungan dengan rumus rasio efisiensi belanja pada Tabel 5. menunjukkan tingkat efisiensi belanja Pemerintah Kota Magelang selama tahun anggaran 2015-2019 berurutur-turut adalah sebesar 79,60% pada tahun 2015, 85,69% pada tahun 2016, 83,15% pada tahun 2017, 87,90% pada tahun 2018, dan 91,03% pada tahun 2019. Tingkat efisiensi belanja mengalami kenaikan selama tahun anggaran 2015-2019, meskipun sempat turun pada tahun 2017. Tingkat efisiensi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan tingkat efisiensi belanja terendah terjadi pada tahun 2015.

Kriteria anggaran belanja Pemerintah Kota Magelang selama tahun 2015-2019 yaitu efisien pada tahun 2015 karena rasio efisiensinya sebesar 79,60%. Hal ini berarti rasio tersebut berada diantara 60% - 80% sehingga dikatakan efisien. Anggaran yang efisien menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan program dan kegiatan dicapai dengan biaya (belanja) yang sesuai dengan yang dianggarkan. Kriteria anggaran belanja untuk tahun 2016-2018 adalah cukup efisien. Dimana pada tahun 2016 rasio efisiensinya sebesar 85,69% , tahun 2017 rasio efisiensinya sebesar 83,15% dan tahun 2018 rasio efisiensinya sebesar 87,90%. Pada tahun 2019 rasio efisiensinya adalah sebesar 91,03%, rasio tersebut berada diantara 90% - 100% sehingga kriteria anggaran belanja pada tahun 2019 kurang efisien. Anggaran yang kurang efisien menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan program dan kegiatan dicapai dengan biaya (belanja) yang kurang sesuai dengan yang dianggarkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang dengan melakukan analisis belanja daerah. Berdasarkan 4 (empat) analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang dilihat dari analisis varians belanja menunjukkan rata-rata selisih (variens) sebesar 14,80% dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran belanja sebesar 85,19%. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari analisis varians menunjukkan pemerintah sudah cukup baik dalam perencanaan anggaran dan upaya untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup berhasil. Hal ini berkaitan dengan penyerapan anggaran belanja diatas 90% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran sementara dibawah 90% menunjukkan indikasi kelemahan dalam perencanaan anggaran.

Kinerja keuangan dilihat dari analisis pertumbuhan memperoleh hasil yang fluktuatif dan positif. Artinya, meskipun tingkat pertumbuhan naik-turun namun pertumbuhan belanja selama tahun 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan yang baik dengan rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 7,98%. Berdasarkan hasil analisis keserasian belanja diketahui bahwa rata-rata proporsi untuk belanja operasi adalah sebesar 75,18% dan belanja modal sebesar 24,76%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Magelang dapat dikatakan kurang optimal. Hal ini berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani (14/11/2019) bahwa pengelolaan keuangan daerah belum optimal karena 70% anggaran digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah dan hanya 30% dinikmati oleh masyarakat. Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja menunjukkan rata-rata tingkat efisiensi adalah sebesar 85,47%. Secara umum kinerja keuangan dapat dikatakan cukup efisien. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 bahwa anggaran belanja dikatakan cukup efisien jika rasio efisiensinya antara 80% - 90%. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu jenis analisis belanja daerah yang dilakukan dikarenakan keterbatasan data. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penambahan jenis analisis dan pengumpulan data yang bisa ditambah dengan data primer yang diperoleh secara langsung mengingat beberapa data memiliki keterbatasan akses jika dilakukan secara online saja.

REFERENSI

- Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Lingkup Akuntansi Sektor Publik.*
- Chandarin, G (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif.* Jakarta : Salemba Empat
- Hasanah, N., & Vidiyastutik, E. D. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Ecobuss*, 6(2), 26-35.

- Katit, F. X., & Pinatik, S. (2016). Analisis Kinerja Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
- Kawatu, F.S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta : Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Kementerian Keuangan (2019). Ini ‘Catatan’ Menkeu Terhadap Pengelolaan APBD yang Kurang Optimal. www.kemenkeu.go.id, diakses 15 Maret 2020.
- Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-2019. www.bpkad.magelangkota.go.id, diakses 15 Maret 2020.
- Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-2019. www.magelangkota.go.id, diakses 15 Maret 2020.
- Nurkholis & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang : UB Press
- Palilingan, A. F., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2015). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara